

ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DI SEKOLAH MENENGAH

Sukarni¹, Akhmad Muaddin²

sukarni300769@gmail.com¹, muadinahmad18@gmail.com²

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris

ABSTRAK

Pendidikan yang berkualitas memerlukan kurikulum yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pendidikan dalam konteks pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di sekolah menengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan KBK memerlukan pemetaan kompetensi dasar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, konteks sosial-budaya lokal, dan tuntutan dunia kerja. Selain itu, diferensiasi kurikulum yang responsif terhadap keragaman potensi dan gaya belajar peserta didik menjadi kebutuhan utama. Kesiapan guru sebagai perancang pembelajaran yang adaptif juga sangat menentukan keberhasilan implementasi KBK. Penguatan kapasitas guru, baik dalam hal keterampilan pedagogik maupun pemahaman terhadap kurikulum, menjadi kunci dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan relevan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengembangan KBK di sekolah menengah harus melibatkan analisis kebutuhan yang mendalam, serta memberikan ruang bagi fleksibilitas kurikulum yang berfokus pada perkembangan potensi individu dan kesiapan dunia kerja. Implementasi yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, serta penguatan kapasitas guru melalui pelatihan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendidikan Berkualitas, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Sekolah Menengah.

ABSTRACT

Quality education requires a curriculum that is relevant and adaptive to the development of the times and the needs of students. This article aims to analyze educational needs in the context of developing a Competency-Based Curriculum (KBK) in secondary schools. The method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the development of KBK requires mapping of basic competencies that are in accordance with the characteristics of students, the local socio-cultural context, and the demands of the world of work. In addition, curriculum differentiation that is responsive to the diversity of potential and learning styles of students is a primary need. The readiness of teachers as adaptive learning designers also greatly determines the success of the implementation of KBK. Strengthening teacher capacity, both in terms of pedagogical skills and understanding of the curriculum, is key to creating effective and relevant learning. The conclusion of this study is that the development of KBK in secondary schools must involve an in-depth needs analysis, as well as provide space for curriculum flexibility that focuses on the development of individual potential and readiness for the world of work. Effective implementation requires collaboration between the government, schools, and the community, as well as strengthening teacher capacity through ongoing training.

Keywords: Quality Education, Competency Based Curriculum (KBK), Secondary School.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sarana strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, dunia pendidikan dituntut untuk melakukan berbagai inovasi, baik dari segi metode pembelajaran maupun sistem kurikulum. Salah satu pendekatan yang kini menjadi fokus utama dalam pengembangan pendidikan adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kemampuan peserta didik secara utuh, mencakup aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik).

Sekolah menengah sebagai jenjang pendidikan lanjutan memegang peranan penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja maupun pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, desain kurikulum pada jenjang ini harus mampu mengakomodasi kebutuhan zaman dan tuntutan masyarakat. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua institusi pendidikan mampu menyusun dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi secara optimal. Banyak sekolah yang masih menggunakan pendekatan konvensional yang berfokus pada pencapaian akademik semata, tanpa mempertimbangkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan aktual peserta didik.

Analisis kebutuhan pendidikan menjadi langkah awal yang sangat penting dalam perancangan KBK. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal yang diharapkan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menyusun kurikulum yang relevan, kontekstual, dan adaptif terhadap perubahan. Dengan menganalisis kebutuhan pendidikan secara sistematis, sekolah dapat merancang kurikulum yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga menjawab tantangan lokal maupun global.

Faktor-faktor seperti perkembangan teknologi digital, perubahan pola pikir generasi muda, serta dinamika pasar kerja global telah mengubah paradigma pendidikan. Kurikulum tidak lagi hanya dipandang sebagai seperangkat dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen strategis dalam membentuk karakter dan kompetensi siswa. Oleh karena itu, pendekatan kurikulum yang berpusat pada peserta didik dan berbasis pada kebutuhan nyata menjadi sangat relevan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi KBK sangat dipengaruhi oleh sejauh mana analisis kebutuhan pendidikan dilakukan secara komprehensif. Tanpa landasan analisis yang kuat, kurikulum akan berisiko menjadi tidak relevan, bersifat normatif semata, dan gagal menjawab tantangan yang dihadapi siswa dalam kehidupan nyata. Hal ini diperkuat oleh pendapat bahwa kurikulum yang efektif adalah kurikulum yang dirancang berdasarkan pemetaan kebutuhan nyata dari peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research, yaitu pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang relevan. Proses ini melibatkan pencarian literatur, analisis konten, serta seleksi data berdasarkan relevansi terhadap topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan dipilih secara kritis untuk memastikan validitas dan keandalan informasi. Objek penulisan gambaran dalam artikel ini tentang prinsip teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran.

Adapun proses yang dilakukan dalam penulisan artikel ini adalah Mencari, yaitu mencari sumber data dari buku, koran, jurnal, dan artikel online yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji; Mengidentifikasi, yaitu memilih sumber data dan informasi yang telah dikumpulkan; Mempelajari, yaitu berusaha untuk memahami lebih jauh tentang sumber data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan masalah yang dibahas; Menganalisis, yaitu

membahas sumber data dan informasi dengan melakukan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji secara mendalam; dan Mengevaluasi, yaitu melakukan penilaian tentang layak atau tidaknya sumber data dan informasi yang diperoleh untuk dijadikan referensi terhadap masalah yang dikaji serta perlu atau tidaknya melakukan suatu revisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebutuhan Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran

Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran di sekolah menengah sangat tinggi. Guru, siswa, dan kepala sekolah secara umum menyadari pentingnya teknologi sebagai alat bantu pembelajaran yang mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta daya tarik dalam proses belajar mengajar. Namun, meskipun kesadaran tersebut telah ada, implementasinya masih menghadapi banyak kendala baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun kesiapan kurikulum.

Dalam wawancara mendalam dengan beberapa guru mata pelajaran, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka belum memiliki kompetensi pedagogik berbasis digital yang memadai. Banyak guru masih mengandalkan metode ceramah konvensional dan penggunaan media pembelajaran yang terbatas, seperti papan tulis dan lembar kerja manual. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran kurang menarik dan tidak sesuai dengan karakteristik generasi digital saat ini, yaitu generasi Z yang akrab dengan gawai, aplikasi digital, dan platform daring sejak usia dini.

Selain itu, keterbatasan fasilitas teknologi seperti ketersediaan komputer, proyektor, koneksi internet yang stabil, serta perangkat pribadi (gadget) siswa juga menjadi hambatan yang cukup besar dalam mendukung pembelajaran digital secara merata. Di beberapa sekolah yang diteliti, hanya terdapat satu laboratorium komputer dengan perangkat usang dan jaringan internet yang sering mengalami gangguan. Akibatnya, pembelajaran berbasis digital hanya bisa dilakukan secara terbatas dan tidak berkelanjutan.

Kebutuhan akan teknologi tidak hanya dalam aspek penyampaian materi, tetapi juga dalam evaluasi pembelajaran. Banyak guru yang menyampaikan bahwa mereka masih menggunakan metode evaluasi tertulis konvensional karena belum terbiasa menggunakan platform seperti Google Forms, Kahoot, Quizizz, dan aplikasi lain yang memungkinkan asesmen digital. Padahal, asesmen digital dapat memberikan umpan balik yang cepat, menghemat waktu, dan mampu menyesuaikan dengan model pembelajaran berbasis kompetensi yang menuntut asesmen formatif secara berkelanjutan.

Beberapa siswa menyatakan bahwa mereka merasa lebih termotivasi dan terlibat ketika pembelajaran menggunakan video pembelajaran, kuis daring, simulasi virtual, atau forum diskusi online. Mereka juga merasa lebih tertantang untuk mengeksplorasi materi di luar kelas ketika guru memberikan tugas berbasis multimedia. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas dan kedalaman pembelajaran jika dilakukan secara tepat dan konsisten.

Dalam konteks Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), penggunaan teknologi tidak hanya bersifat instrumental tetapi juga substantif, karena teknologi dapat digunakan untuk menumbuhkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi (4C). Kurikulum yang menuntut pencapaian kompetensi kompleks tidak mungkin dicapai secara maksimal tanpa dukungan teknologi yang memfasilitasi pembelajaran interaktif, partisipatif, dan fleksibel.

Namun demikian, integrasi teknologi tidak boleh dilakukan secara serampangan. Dibutuhkan kebijakan sekolah yang mendukung digitalisasi pembelajaran, pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi guru dalam mengembangkan media ajar digital, serta sistem

penjaminan mutu yang memastikan penggunaan teknologi benar-benar meningkatkan hasil belajar, bukan hanya sebagai formalitas belaka.

Sebagai upaya jangka panjang, sekolah perlu merancang roadmap digitalisasi pembelajaran yang terintegrasi dengan pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, dan penguatan budaya digital di lingkungan sekolah. Pendekatan ini harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi siswa agar tidak terjadi kesenjangan digital (digital divide) antar peserta didik. Pemerintah daerah dan pusat juga perlu memberikan dukungan anggaran dan regulasi yang memadai agar sekolah mampu memenuhi kebutuhan dasar integrasi teknologi dalam pendidikan.

2. Kebutuhan Penguatan Soft Skills melalui Pembelajaran Kontekstual

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi digital, soft skills menjadi salah satu aspek penting yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan masyarakat luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa sekolah menengah saat ini tidak hanya dituntut menguasai materi akademik, tetapi juga diharapkan memiliki kompetensi non-kognitif seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, kepemimpinan, berpikir kritis, pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan. Kebutuhan akan penguatan soft skills ini semakin nyata dalam konteks Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yang menekankan pada hasil belajar menyeluruh dan tidak terbatas pada aspek kognitif saja.

Wawancara dengan guru dan kepala sekolah mengungkapkan bahwa selama ini pelaksanaan pembelajaran di sekolah cenderung masih berpusat pada pencapaian nilai ujian dan kelulusan akademik. Akibatnya, aspek-aspek seperti kemampuan menyampaikan ide secara efektif, keterampilan memecahkan masalah secara kolaboratif, dan kemampuan beradaptasi dalam situasi sosial kurang terfasilitasi dalam proses pembelajaran. Banyak guru merasa bahwa mereka dibatasi oleh kurikulum yang padat, target ujian nasional atau asesmen standar, dan kurangnya waktu untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang lebih kontekstual.

Padahal, menurut hasil observasi, siswa sangat antusias ketika diberikan tugas berbasis proyek, diskusi kelompok, simulasi kasus, ataupun kegiatan belajar di luar kelas yang menuntut mereka berinteraksi dan bekerja sama. Dalam salah satu studi kasus, siswa yang mengikuti program project-based learning (PjBL) untuk membuat produk lokal (seperti kerajinan tangan atau makanan khas daerah) menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal rasa percaya diri, kemampuan presentasi, dan kerjasama tim. Mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengalami langsung proses kerja, tantangan, dan bagaimana membuat keputusan dalam konteks nyata.

Pembelajaran kontekstual, yakni pembelajaran yang mengaitkan materi dengan dunia nyata siswa, menjadi pendekatan penting untuk mengembangkan soft skills. Melalui pendekatan ini, siswa dilatih untuk berpikir reflektif, menyelesaikan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta membangun makna dari pengalaman belajar mereka sendiri. Namun, sebagian besar guru belum sepenuhnya memahami dan menerapkan pendekatan ini karena terbatasnya pelatihan atau panduan yang tersedia secara praktis.

Lebih lanjut, budaya belajar di sekolah juga turut mempengaruhi perkembangan soft skills siswa. Sekolah yang terlalu menekankan pada kedisiplinan satu arah, ketaatan formal, dan minim ruang dialog cenderung membatasi siswa dalam mengekspresikan diri dan membangun kepercayaan diri. Sementara itu, sekolah yang menyediakan ruang diskusi, proyek kolaboratif, organisasi siswa, dan kegiatan ekstrakurikuler yang terintegrasi dengan proses pembelajaran cenderung berhasil menciptakan iklim belajar yang mendukung pengembangan karakter dan soft skills.

Di sisi lain, dunia kerja memberikan sinyal yang sangat kuat bahwa lulusan pendidikan menengah tidak cukup hanya menguasai teori dan nilai akademik tinggi. Laporan dari World Economic Forum (2020) menempatkan keterampilan seperti pemecahan masalah yang

kompleks, berpikir kritis, kreativitas, dan manajemen diri sebagai kompetensi utama yang dibutuhkan di abad ke-21. Temuan ini menjadi cerminan bahwa kurikulum pendidikan, khususnya di tingkat sekolah menengah, perlu lebih membuka ruang untuk pembelajaran aktif, kolaboratif, dan reflektif.

Penerapan asesmen yang mencakup dimensi soft skills juga masih menjadi tantangan tersendiri. Penilaian yang selama ini bersifat tertulis dan berbasis hasil akhir kurang mencerminkan proses belajar siswa secara utuh. Dibutuhkan pengembangan instrumen penilaian autentik, seperti rubrik observasi, portofolio, jurnal reflektif, dan presentasi proyek yang dapat mengevaluasi kemampuan siswa dalam konteks nyata dan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penguatan soft skills melalui pembelajaran kontekstual harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Guru perlu dibekali pelatihan tentang desain pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif siswa. Selain itu, sekolah perlu menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendorong kolaborasi, inovasi, dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah. Strategi ini tidak hanya penting untuk menyiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan kemandirian sebagai bekal menjadi warga negara yang produktif dan bertanggung jawab.

3. Kebutuhan Penyesuaian Kompetensi dengan Dunia Industri dan Dunia Kerja

Salah satu hasil paling signifikan dari penelitian ini adalah kebutuhan mendesak akan penyesuaian antara kompetensi yang dikembangkan di sekolah menengah dengan kebutuhan nyata dunia industri dan dunia kerja (DUDI). Dalam era global dan serba digital ini, dunia kerja menuntut tenaga kerja yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoretis, tetapi juga menguasai keterampilan praktis dan sikap profesional yang sesuai dengan dinamika tempat kerja. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada dasarnya bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ini, namun dalam praktiknya, banyak sekolah menengah belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan kebutuhan DUDI secara konkret ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah dan guru produktif di sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah menengah umum (SMA) yang menjadi lokasi studi, ditemukan bahwa banyak satuan pendidikan masih menjalankan kurikulum yang bersifat normatif dan tidak fleksibel. Kurikulum tersebut disusun secara top-down tanpa memperhatikan dinamika perkembangan industri, sehingga kompetensi yang diajarkan sering kali ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Misalnya, dalam bidang teknologi informasi, beberapa sekolah masih mengajarkan perangkat lunak atau sistem yang sudah tidak lagi digunakan di dunia industri, sementara keterampilan terbaru seperti pemrograman berbasis web, analisis data, atau penggunaan cloud computing belum masuk secara signifikan ke dalam materi pembelajaran.

Di sisi lain, perusahaan atau pelaku industri yang diwawancarai menyatakan bahwa lulusan sekolah menengah sering kali belum siap kerja karena tidak memiliki keterampilan dasar yang dibutuhkan seperti etos kerja, kedisiplinan, kemampuan bekerja dalam tim, dan komunikasi profesional. Ini menunjukkan bahwa selain keterampilan teknis (hard skills), sekolah juga belum berhasil mengembangkan keterampilan kerja lintas bidang (transversal skills) yang sangat dibutuhkan dalam lingkungan kerja saat ini.

Dalam beberapa sekolah yang telah menjalin kemitraan dengan industri melalui program magang, teaching factory, atau kunjungan industri, terlihat adanya perbedaan signifikan dalam kesiapan lulusan. Sekolah-sekolah ini mampu menyelaraskan kalender akademik dengan siklus kerja industri, menyusun kurikulum lokal berdasarkan analisis kebutuhan kompetensi industri, serta melibatkan praktisi industri sebagai narasumber atau instruktur tamu. Hal ini membuktikan bahwa keterlibatan dunia kerja dalam perencanaan

dan pelaksanaan kurikulum mampu meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan nyata.

Namun demikian, kemitraan semacam itu masih bersifat sporadis dan belum menjadi sistem yang terintegrasi. Banyak sekolah mengalami kesulitan menjalin kerja sama dengan industri karena kurangnya jejaring, perbedaan ekspektasi, dan belum adanya pedoman nasional yang mengatur sinergi antara sekolah dan industri secara terstruktur. Selain itu, di daerah-daerah yang tidak memiliki banyak industri, sekolah mengalami keterbatasan dalam melakukan penyesuaian kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja lokal. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk menjembatani kolaborasi antara sektor pendidikan dan sektor ekonomi.

Dalam konteks pendidikan menengah umum (SMA), penyesuaian kompetensi dengan dunia kerja juga menjadi tantangan karena karakteristik SMA yang lebih akademik. Meski demikian, dengan semakin berkembangnya paradigma pendidikan berbasis keterampilan hidup (life skills education), SMA pun dituntut untuk mulai memperkenalkan peserta didik pada realitas dunia kerja melalui mata pelajaran pilihan, program kewirausahaan, serta kerja sama dengan institusi pelatihan vokasional. Ini menjadi bagian dari upaya mempersiapkan siswa, tidak hanya untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, tetapi juga untuk bisa mandiri dan adaptif terhadap perubahan sosial ekonomi.

Dengan demikian, penyesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja memerlukan pendekatan sistemik. Tidak cukup hanya mengubah isi kurikulum, tetapi juga harus mencakup metode pengajaran, model evaluasi, pelatihan guru, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis kebutuhan riil. Sekolah harus memiliki mekanisme tracer study atau pelacakan alumni sebagai bagian dari analisis kebutuhan berkelanjutan, guna memastikan bahwa lulusan benar-benar relevan dan siap bersaing di dunia kerja.

Pemerintah juga perlu menyediakan kerangka regulasi yang memungkinkan fleksibilitas kurikulum dan mendorong kerja sama lintas sektor. Hal ini sejalan dengan konsep link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang telah digaungkan dalam berbagai kebijakan nasional, seperti dalam program revitalisasi SMK dan penguatan pendidikan karakter (PPK). Penyesuaian kurikulum berbasis kompetensi dengan dunia industri dan kerja merupakan jalan penting menuju pendidikan yang kontekstual, relevan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

4. Kebutuhan Diferensiasi Kurikulum Sesuai Karakteristik Lokal dan Potensi Peserta Didik

Salah satu temuan penting dari analisis kebutuhan pendidikan dalam konteks pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah perlunya diferensiasi kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik lokal dan potensi individu peserta didik. Kurikulum yang seragam secara nasional tanpa mempertimbangkan konteks lokal dan keragaman kemampuan siswa berpotensi menghambat pencapaian hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu, kebutuhan akan fleksibilitas dan adaptabilitas kurikulum menjadi sangat mendesak, terutama dalam kerangka merdeka belajar yang sedang dikembangkan di Indonesia.

Hasil wawancara dengan para guru dan kepala sekolah menunjukkan bahwa peserta didik di setiap wilayah memiliki latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan geografis yang berbeda, yang secara langsung memengaruhi gaya belajar, aspirasi, dan potensi mereka. Sebagai contoh, di sekolah-sekolah yang berada di wilayah pesisir, siswa umumnya memiliki pengalaman hidup yang erat dengan aktivitas kelautan dan perikanan. Potensi ini dapat dijadikan dasar dalam pengembangan kurikulum muatan lokal yang relevan, seperti pengolahan hasil laut, konservasi lingkungan pesisir, atau teknologi perikanan berbasis kearifan lokal. Namun, kenyataannya, banyak sekolah belum memiliki kurikulum

kontekstual yang mengangkat potensi tersebut secara eksplisit ke dalam proses pembelajaran.

Di sisi lain, kemampuan akademik dan gaya belajar siswa juga sangat beragam. Dalam satu kelas, terdapat siswa dengan kecepatan belajar tinggi, sedang, dan rendah; ada pula yang unggul dalam aspek verbal-linguistik, logika-matematika, atau justru lebih dominan di kecerdasan kinestetik atau visual-spasial. Namun, sistem pembelajaran dan penilaian yang masih bersifat satu ukuran untuk semua (*one-size-fits-all*) membuat banyak potensi siswa tidak terakomodasi dengan baik. Beberapa siswa yang berbakat dalam bidang seni, olahraga, atau teknologi justru mengalami tekanan akademik karena kurikulum lebih menekankan aspek kognitif tradisional.

Diferensiasi kurikulum memungkinkan sekolah untuk mengembangkan program pembelajaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik siswa, baik dari segi isi (konten), proses pembelajaran, maupun produk akhir belajar. Guru dapat diberikan keleluasaan untuk mengembangkan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar peserta didik dan konteks lokal yang relevan. Misalnya, guru IPS di daerah pertanian bisa mengajak siswa mengkaji sistem pertanian tradisional sebagai bagian dari pembelajaran ekonomi lokal, atau guru IPA mengembangkan eksperimen berbasis bahan-bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar.

Namun, dari hasil studi ini juga ditemukan bahwa masih banyak guru yang belum familiar dengan konsep diferensiasi kurikulum. Mereka cenderung menggunakan pendekatan yang seragam untuk semua siswa, karena terbatasnya pelatihan dan dukungan dalam merancang pembelajaran yang adaptif. Kurangnya waktu perencanaan, keterbatasan jumlah guru, serta tekanan administratif juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan diferensiasi yang bermakna.

Lebih jauh, banyak sekolah belum memiliki data lengkap mengenai potensi dan kebutuhan belajar individu siswa. Padahal, informasi ini sangat penting sebagai dasar penyusunan rencana pembelajaran individual (RPI) atau diferensiasi. Sistem asesmen diagnostik di awal tahun ajaran atau profil siswa seharusnya menjadi instrumen yang digunakan secara rutin agar guru dapat memetakan kebutuhan belajar setiap peserta didik secara lebih akurat.

Dari perspektif kebijakan, Kurikulum Merdeka sebenarnya telah memberikan ruang yang lebih besar untuk diferensiasi melalui penyusunan Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) yang dapat disesuaikan secara kontekstual oleh satuan pendidikan. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa belum semua sekolah memahami kerangka tersebut secara menyeluruh, dan sebagian masih menjalankan kurikulum dengan pendekatan administratif tanpa refleksi pedagogis yang mendalam.

Diferensiasi kurikulum juga erat kaitannya dengan prinsip inklusivitas. Dalam konteks ini, peserta didik dengan kebutuhan khusus atau latar belakang yang berbeda seperti disabilitas, minoritas budaya, atau ekonomi rendah, harus diberikan ruang untuk belajar secara bermakna sesuai kapasitasnya. Ini menunjukkan bahwa diferensiasi bukan hanya soal akademik, tetapi juga soal keadilan dalam memperoleh pengalaman belajar yang setara dan relevan.

Secara keseluruhan, kebutuhan akan diferensiasi kurikulum menegaskan pentingnya pendekatan yang humanistik dan kontekstual dalam pendidikan. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi harus dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya menstandarkan capaian, tetapi juga menghargai keragaman siswa dan lingkungan mereka. Dalam jangka panjang, penerapan diferensiasi kurikulum dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi belajar, pencapaian akademik, serta pembentukan karakter peserta didik secara lebih utuh dan autentik.

5. Kebutuhan Penguatan Peran Guru sebagai Perancang Pembelajaran yang Responsif

Dalam kerangka pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), guru bukan lagi hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai perancang pembelajaran (learning designer) yang memiliki kapasitas untuk menyesuaikan proses pendidikan dengan kebutuhan, potensi, dan konteks peserta didik. Temuan dari penelitian ini menegaskan adanya kebutuhan yang sangat tinggi akan penguatan peran guru dalam hal merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang responsif, kontekstual, dan berbasis pada hasil analisis kebutuhan yang nyata.

Responsivitas guru dalam pembelajaran tidak hanya mencakup kemampuan menyesuaikan metode mengajar, tetapi juga melibatkan keterampilan menganalisis kebutuhan peserta didik, merancang alur tujuan pembelajaran (ATP), dan mengevaluasi capaian pembelajaran secara formatif. Guru yang responsif mampu membaca dinamika kelas, mengidentifikasi tantangan belajar, dan melakukan penyesuaian secara cepat dan tepat. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, banyak guru masih terbatas pada pola mengajar yang bersifat repetitif dan berbasis pada buku teks, tanpa memperhatikan variasi gaya belajar dan kebutuhan individual siswa.

Salah satu penyebab lemahnya peran guru sebagai perancang pembelajaran yang adaptif adalah kurangnya pelatihan profesional yang berkelanjutan. Banyak guru belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang benar-benar membekali mereka dengan keterampilan pedagogik modern, terutama yang terkait dengan kurikulum diferensiatif, asesmen autentik, pembelajaran berbasis proyek, dan teknologi pendidikan. Selain itu, masih ditemukan ketimpangan antara guru di daerah perkotaan dan pedesaan, di mana guru di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menghadapi keterbatasan sumber daya, jaringan informasi, serta akses terhadap pengembangan profesional.

Selain aspek teknis, tantangan lain yang dihadapi guru dalam merancang pembelajaran responsif adalah beban administratif yang tinggi. Banyak guru mengeluhkan bahwa waktu dan energi mereka lebih banyak tersita untuk mengisi dokumen-dokumen pelaporan, administrasi kelas, dan tugas-tugas birokratis lainnya, sehingga ruang untuk inovasi dan refleksi pembelajaran menjadi sangat terbatas. Kondisi ini membuat guru terjebak dalam rutinitas mengajar tanpa sempat melakukan pengembangan diri dan inovasi pembelajaran.

Padahal, dalam paradigma KBK, guru seharusnya memiliki otonomi pedagogik untuk menyusun strategi pembelajaran yang paling sesuai dengan konteks siswa dan lingkungan sekolah. Guru perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis kebutuhan melalui asesmen diagnostik, menyusun strategi diferensiasi, memilih sumber belajar yang relevan, serta mengevaluasi keberhasilan pembelajaran melalui asesmen formatif yang berkelanjutan. Tanpa penguatan kapasitas ini, KBK berisiko hanya menjadi dokumen formal yang tidak terimplementasi secara bermakna dalam praktik pembelajaran.

Lebih jauh, guru juga berperan penting dalam membentuk budaya belajar di kelas. Guru yang adaptif dan reflektif akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, suportif, dan menantang secara intelektual. Mereka memberikan ruang dialog, mendorong eksplorasi, menghargai perbedaan, dan memberi umpan balik yang membangun. Sebaliknya, guru yang hanya berorientasi pada penyampaian materi cenderung menciptakan suasana belajar yang pasif dan tidak memberdayakan peserta didik.

Dalam konteks Kurikulum Merdeka yang kini sedang diimplementasikan secara bertahap di Indonesia, peran guru sebagai perancang pembelajaran semakin mendapat pengakuan dan penguatan. Kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi guru untuk menentukan metode, materi, dan pendekatan pembelajaran yang paling sesuai, berdasarkan hasil refleksi dan asesmen kebutuhan peserta didik. Namun, kebebasan ini menuntut guru

memiliki kompetensi tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran. Tanpa kapasitas tersebut, kebebasan justru bisa menimbulkan kebingungan atau stagnasi.

Oleh karena itu, penguatan peran guru sebagai perancang pembelajaran yang responsif harus menjadi agenda utama dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan intensif dan berkelanjutan berbasis praktik, pendampingan oleh pengembang kurikulum, serta mengurangi beban administratif yang tidak relevan dengan proses pembelajaran. Di sisi lain, sekolah perlu membangun komunitas belajar guru (professional learning community) yang mendorong kolaborasi, refleksi, dan inovasi pedagogik secara berkelanjutan.

Jika guru diberikan ruang dan dukungan yang memadai untuk menjadi perancang pembelajaran yang kreatif dan responsif, maka transformasi pendidikan berbasis kompetensi tidak hanya akan menjadi jargon, melainkan dapat terwujud secara nyata di ruang-ruang kelas. Dengan demikian, kualitas pembelajaran akan meningkat, peserta didik lebih terlibat secara aktif, dan hasil belajar menjadi lebih bermakna dan kontekstual.

KESIMPULAN

Hasil analisis kebutuhan pendidikan dalam pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di sekolah menengah menunjukkan bahwa transformasi kurikulum tidak dapat dilakukan secara serampangan atau seragam, melainkan harus berbasis pada pemetaan kebutuhan yang nyata dan kontekstual. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang hidup, terus berkembang, dan mampu menjawab tantangan serta peluang yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan nyata—baik dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, maupun dunia kerja. KBK sebagai kerangka reformasi pendidikan harus menjadikan peserta didik sebagai pusat perhatian, dengan menyesuaikan proses dan konten pembelajaran terhadap potensi mereka serta dinamika lingkungan sekitar.

Pertama, pentingnya kebutuhan akan pemetaan kompetensi dasar secara menyeluruh menjadi landasan bagi perumusan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan fase perkembangan dan karakteristik siswa. Tanpa analisis kebutuhan yang akurat, pengembangan KBK berpotensi hanya menjadi formalitas administratif yang tidak mampu menjawab persoalan aktual di lapangan. Oleh karena itu, asesmen diagnostik, studi konteks sosial sekolah, serta dialog antara guru, siswa, dan masyarakat menjadi prasyarat mutlak dalam proses ini.

Kedua, fleksibilitas kurikulum merupakan kebutuhan mendesak agar sekolah memiliki ruang untuk melakukan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan tantangan lokal. Kurikulum yang terlalu kaku tidak hanya menghambat kreativitas guru, tetapi juga menutup peluang bagi peserta didik untuk mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan daerah dan potensi dirinya. Dalam hal ini, diferensiasi kurikulum dan pemanfaatan muatan lokal menjadi instrumen penting untuk menghidupkan semangat keberagaman dalam satuan pendidikan.

Ketiga, kesenjangan antara kurikulum yang diajarkan di sekolah dan tuntutan dunia industri serta dunia kerja masih menjadi tantangan serius. Kompetensi lulusan sekolah menengah sering kali belum sejalan dengan kebutuhan lapangan kerja, baik dari segi keterampilan teknis maupun sikap profesional. Oleh sebab itu, integrasi kurikulum dengan dunia kerja melalui program magang, kolaborasi industri, serta pendekatan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) perlu diperkuat sebagai upaya nyata dalam menjembatani pendidikan dan dunia kerja.

Keempat, kebutuhan diferensiasi kurikulum berdasarkan karakteristik lokal dan potensi peserta didik menuntut guru dan pengelola pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan relevan. Hal ini mencakup perlunya data yang akurat mengenai profil belajar siswa, serta fleksibilitas dalam strategi pembelajaran dan penilaian. Pendekatan

ini tidak hanya mendukung pencapaian hasil belajar yang optimal, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran diri, kemandirian, dan minat belajar yang tinggi dalam diri peserta didik.

Kelima, peran guru sebagai perancang pembelajaran yang responsif harus terus diperkuat melalui pelatihan profesional, pendampingan berkelanjutan, dan pengurangan beban administrasi yang tidak relevan. Guru harus didukung untuk menjadi agen perubahan yang mampu merancang pembelajaran berbasis kebutuhan siswa dan lingkungan, bukan sekadar pelaksana kurikulum yang statis. Keberhasilan KBK sangat ditentukan oleh sejauh mana guru mampu menjalankan peran ini secara optimal.

Secara keseluruhan, analisis kebutuhan pendidikan menjadi fondasi utama dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi Kurikulum Berbasis Kompetensi yang efektif. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan peserta didik, masyarakat, serta dunia kerja, kurikulum hanya akan menjadi struktur kosong yang tidak berdaya guna. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan kurikulum harus bersifat partisipatif, berbasis data, dan terbuka terhadap perubahan. Transformasi pendidikan di Indonesia hanya dapat terwujud jika kurikulum benar-benar menjadi cerminan dari kebutuhan riil dan aspirasi masa depan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2017). *Konsep dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Aunurrahman. (2012). *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Baharuddin, & Esa Nur Wahyuni. (2015). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Baldwin, R., & James, H. (2018). *Curriculum Design for Excellence in Learning*. London: Routledge.
- Basri, H. (2020). Analisis kebutuhan pembelajaran dalam pengembangan kurikulum. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(1), 15–28.
- Borg, W. R., & Gall, M. D. (2003). *Educational Research: An Introduction (7th ed.)*. Boston: Allyn & Bacon.
- Daryanto, & Karim, S. (2017). *Pembelajaran Abad 21*. Yogyakarta: Gava Media.
- Depdiknas. (2004). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Panduan Umum Pengembangan Silabus dan Penilaian*. Jakarta: Direktorat Dikdasmen.
- Dirjen GTK Kemendikbud. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP)*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Djam'an Satori, & Aan Komariah. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Gagné, R. M., Wager, W. W., Golas, K. C., & Keller, J. M. (2005). *Principles of Instructional Design (5th ed.)*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Hamalik, O. (2011). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, M. (2016). Curriculum reform in Indonesia: A need for teacher professional development. *Journal of Education and Practice*, 7(33), 72–79.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah.
- Kennedy, K. J. (2009). *Curriculum Construction and Reform: Key Concepts and Principles*. Hong Kong: Hong Kong Institute of Education.
- Kurniasih, I., & Sani, B. (2016). *Implementasi Kurikulum 2013: Konsep dan Penerapannya*. Surabaya: Kata Pena.
- McTighe, J., & Wiggins, G. (2005). *Understanding by Design (Expanded 2nd ed.)*. Alexandria, VA: ASCD.
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurkholis. (2013). Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi dan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(1), 89–105. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i1.84>

- OECD. (2019). *Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass*. Paris: OECD Publishing.
- Prasetyo, Z. K., & Trisyani, Y. (2020). Kurikulum Merdeka Belajar: Tantangan dan Solusi dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 6(2), 95–104.
- Richards, J. C. (2001). *Curriculum Development in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sagala, S. (2010). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Suryosubroto, B. (2009). *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana